

ABSTRACT

The background of the problem of this study is that the implementation of the fire extinguisher inspection retribution policy in Bandung has not been optimal, from the background of the problem the researchers identified the problem as follows: How is the implementation of the policy to collect fire extinguisher inspection fees at the Fire and Disaster Management Agency in Bandung City, What are the supporting factors and obstacles to the implementation of the policy to collect fire extinguisher inspection fees at the Fire and Disaster Management Agency in Bandung City and What efforts have been made by the Fire and Disaster Management Agency in implementing the policy to collect fire extinguisher inspection fees in the city of Bandung.

The cornerstone of this theory uses the theory of policy implementation, the researcher formulates the following propositions: "Implementation of Fire Extinguisher Inspection Policy in Bandung City" will be optimal if you pay attention to the dimensions of Communication, Resources, Disposition and Structure of the Bureaucracy.

The method in the study is qualitative and the type of research used is a descriptive approach. Sources of data obtained through participant observation, in-depth interviews, literature studies and documentation. The data sources used in the study are primary data, secondary data. Data analysis techniques used in this study are data analysis in the field of Miles and Huberman models, namely data collection, data presentation, data reduction and conclusion.

The results of this study are that the implementation of retribution examination of fire extinguishers based on the Regional Regulation of Bandung City number 12 (clause 56,57,61) of 2012 concerning Prevention, Fire Hazard Mitigation and Fire Extinguisher Inspection Retribution. In its implementation of policy and are factors that become supporter and obstacles to the implementation of fire extinguisher inspection fees and the efforts made by the Fire Service and Disaster Management in implementing the policy of collecting fire extinguisher inspection fees in the city of Bandung are lack of communication between the importance of paying fire extinguisher inspection fees and not adequate resources as a supporter in the implementation of fire extinguisher inspection retribution policies in the city of Bandung, lack of responsibility from officers, not maximal between units and division of authority.

Keyword : Policy Implementation, Retribution Of Fire Protections Inspection

ABSTRAK

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung, dari latar belakang masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dan Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung.

Landasan teori ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan, maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut: “Implementasi Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Bandung” akan optimal jika memperhatikan dimensi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Metode dalam penelitian adalah kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, data sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dilapangan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implemementasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 (pasal 56,57,61) Tahun 2012 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Dalam pelaksanaannya kebijakan, faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung adalah kurangnya komunikasi antara pentingnya membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan tidak memadainya sumber daya sebagai pendukung dalam berjalanya implementasi kebijakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung, kurangnya tanggung jawab dari petugas pelaksana dan belum maksimalnya antara hubungan antar unit dan pembagian wewenang.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran